



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM TENTANG RAHASIA JABATAN
DIRJEN PAJAK BERKAITAN DENGAN PENGUMUMAN
DAFTAR PENGEMPLANG PAJAK OLEH DIRJEN PAJAK**

TESIS

**FITRIA SULISTYA NOVA RINI, S.H
NPM : 0806426925**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM TENTANG RAHASIA JABATAN
DIRJEN PAJAK BERKAITAN DENGAN PENGUMUMAN
DAFTAR PENGEMPLANG PAJAK OLEH DIRJEN PAJAK**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan**

**FITRIA SULISTYA NOVA RINI, S.H
NPM : 0806426925**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

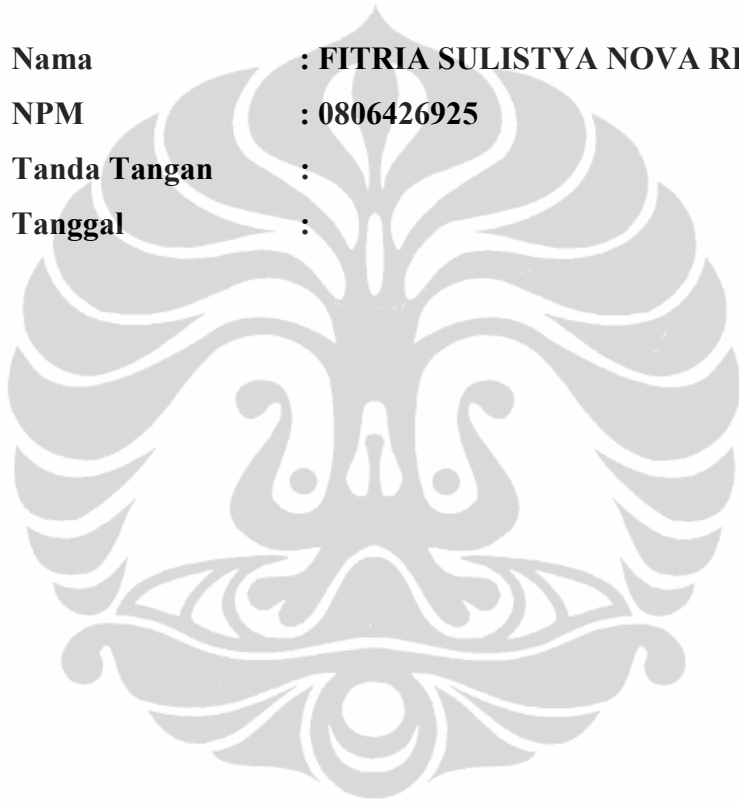
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : FITRIA SULISTYA NOVA RINI

NPM : 0806426925

Tanda Tangan :

Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : FITRIA SULISTYA NOVA RINI
NPM : 0806426925
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Hukum Tentang Rahasia Jabatan Dirjen Pajak
Berkaitan Dengan Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak
Oleh Dirjen Pajak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelas Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : F.X. Sutardjo, S.H., MSc. ()

Penguji : Wenny Setiawan, S.H., M.LI. ()

Penguji : Eka Sri Sunarti, S.H., M.H., C.N. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas bimbingan dan hidayah-Nya, penelitian dan penulis tesis ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan harapan, ditengah kesibukan rutin yang harus penulis kerjakan, tentunya juga berkat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.

Karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. Der Soz. Drs. Gumilar rusliwa Soemantri selaku Rektor Universitas Indonesia.
- 2) Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H, LLM, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 3) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H, M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- 4) Bapak F.X. Sutardjo, S.H, M.Sc. selaku pembimbing kami yang banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada kami sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
- 5) Para dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang banyak memberikan bantuan kepada kami.
- 6) Papa, Mama dan adik-adikku tersayang atas doa, perhatian, semangat dan dukungan yang sangat berarti dalam penyelesaian tesis ini.
- 7) Yuda Laksana atas perhatian dan dukungan yang sudah diberikan selama penyusunan dan penyelesaian tesis ini .
- 8) Para sahabat, teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam merampungkan tesis ini.

Semoga semua bimbingan, arahan, nasehat, masukan serta doa yang diberikan dapat dicatat sebagai amal ibadah dan diberikan pahala sebesar-besarnya oleh Allah SWT.

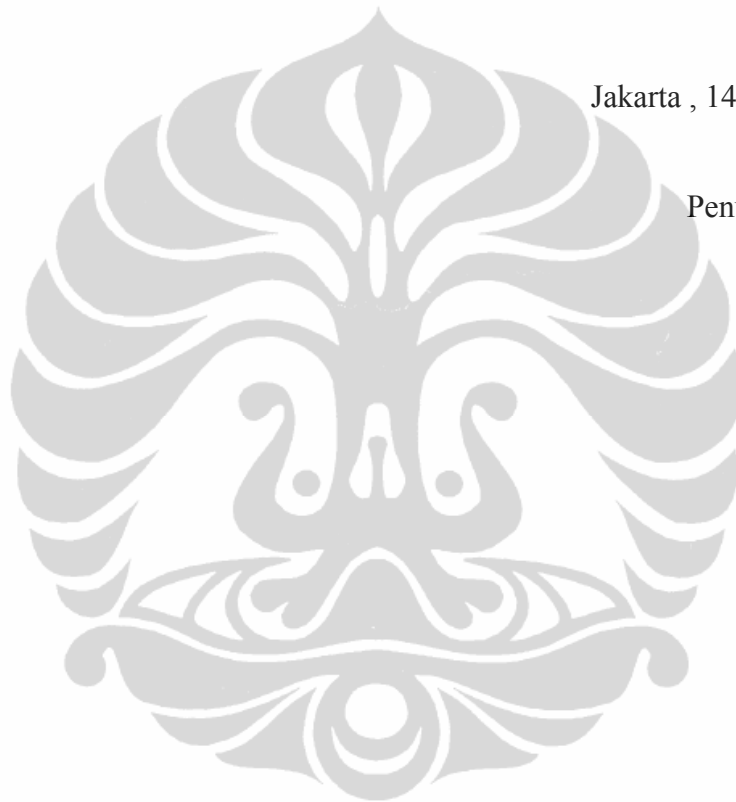
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan perbaikan penulisan tesis ini, sangat penulis harapkan. Penulis

berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu Hukum dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Akhirnya semoga rahmat dan hidayah serta ridho-Nya senantiasa diberikan sebanyak-banyaknya kepada kita semua. Amien Yaa Robbal Alammieen.

Jakarta , 14 Juni 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FITRIA SULISTYA NOVA RINI**

NPM : **0806426925**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Fakultas : **HUKUM**

Jenis Karya : **Tesis**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Hukum Tentang Rahasia Jabatan Dirjen Pajak Berkaitan Dengan Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak Oleh Dirjen Pajak

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal :

Yang menyatakan

FITRIA SULISTYA NOVA RINI

ABSTRAK

Nama : FITRIA SULISTYA NOVA RINI
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Hukum Tentang Rahasia Jabatan Dirjen Pajak
Berkaitan Dengan Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak
Oleh Dirjen Pajak

Segala data atau keterangan berkaitan dengan Wajib Pajak harus dijaga dan dirahasiakan pejabat pajak dalam rangka rahasia jabatan. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Permasalahan pokok adalah bagaimana penerapan Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak dan bagaimana penyelesaian tentang Daftar Pengemplang Pajak yang sudah diumumkan oleh Ditjen Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus diumumkannya Daftar Pengemplang Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak kepada publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut seharusnya pengumuman Daftar Pengemplang Pajak tidak boleh dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak karena melanggar rahasia jabatan dan bertentangan dengan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila memang terjadi tunggakan pajak bisa dilakukan penagihan melalui teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan hingga pelelangan harta Wajib Pajak bukan dengan pengumuman. Pengumuman bisa berdampak negatif terhadap perekonomian yang mengakibatkan target penerimaan negara dari pajak tidak dapat tercapai. Apabila pengumuman sudah dilakukan maka Wajib Pajak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan terhadap pejabat pajak dan terhadap pejabat pajak bisa dipidanakan dengan ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang Undang.

Kata Kunci:

Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak

ABSTRACT

Name : FITRIA SULISTYA NOVA RINI
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Law review regarding profesional oath of Dirjen Pajak in connection with the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak

Tax official usually keep the tax payers data in secret due to their professional oath, as stated in Regulation No. 28/2007 Article 34 (1) on the Taxation Definition and Procedures, "All government official are forbidden to divulge information on the tax payer's to other party in their official capacity to uphold the law". The main problem discussed in this paper is to acknowledge the application of Article 34 (1) Regulation No. 28/2007 on the Taxation Definition and Procedures, in the settlement of tax arrears and the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak (Tax General Directorate). The research method used is literature research, in order to obtain complete and integrated information regarding the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak. The research concludes that Dirjen Pajak is not allowed to divulge the Tax Evader's List to the public, since it is against their professional oath and the Tax Definition and Procedures Regulation. Tax cases such as tax arrears should be solved by claiming the tax owed through giving a reprimand, letter force, foreclosure and auction of the tax payer's property. The publication of the Tax Evader's List could have a negative impact to the nation's economy, and it will decrease the government's tax income. The publication of such a list will also generate lawsuits for the tax officials, resulting in sentence according to the law.

Keyword:

The publication of Tax Evader's List.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| 1.2. Pokok Permasalahan | 13 |
| 1.3. Metode Penelitian | 13 |
| 1.3.1. Jenis Penelitian | 13 |
| 1.3.2. Teknik Pengumpulan Data | 13 |
| 1.3.3. Teknik Analisa Data | 14 |
| 14. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| 2. TINJAUAN HUKUM TENTANG RAHASIA JABATAN DIRJEN PAJAK BERKAITAN DENGAN PENGUMUMAN DAFTAR PENGEMPLANG PAJAK OLEH DIRJEN PAJAK | 16 |
| 2.1. Landasan Teori | 16 |
| 2.1.1. Teori dan Landasan Hukum Pajak | 16 |
| 2.1.1.1. Pengertian Pajak | 16 |
| 2.1.1.2. Dasar Hukum Pajak | 19 |
| 2.1.1.3. Jenis Pajak | 21 |
| 2.1.1.4. Fungsi Pajak | 23 |
| 2.1.2. Tinjauan Pajak Dari Dunia Usaha | 24 |
| 2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak | 25 |
| 2.1.3.1. Menurut Waktu Pemungutan | 25 |
| 2.1.3.2. Menurut Dasar Penetapan Pajak | 25 |
| 2.1.3.3. Menurut Yang Menetapkan Pajaknya | 27 |
| 2.1.4. Lahirnya Utang Pajak | 30 |
| 2.1.5. Prosedur Penagihan Pajak | 35 |
| 2.1.6. Pidana Perpajakan | 38 |
| 2.2. Studi Kasus | 46 |
| 2.2.1. Kasus Posisi | 46 |
| 2.2.2. Analisis Kasus | 49 |
| 2.2.2.1. Penerapan Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 207 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan | 49 |
| 2.2.2.2. Penyelesaian pajak dari Daftar Pengemplang Pajak yang sudah diumumkan oleh Direktur Jenderal Pajak | 57 |
| 3. PENUTUP | 61 |
| 3.1. Kesimpulan | 61 |
| 3.2. Saran | 62 |
| Daftar Pustaka..... | 63 |

LAMPIRAN

- A. Daftar Wawancara.
- B. Kutipan koran dan media online

